

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KARENA
TUNTUTAN PERTANGGUNGJAWABAN AKIBAT KELALAIAN
BERLALU LINTAS**

(Studi Kasus Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau
Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

SAPUTRA RIDHO ABADI

NPM : 1521010035

Jurusan : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KARENA
TUNTUTAN PERTANGGUNGJAWABAN AKIBAT KELALAIAN
BERLALU LINTAS**

(Studi Kasus Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau
Kabupaten Lampung Barat)

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
SAPUTRA RIDHO ABADI
NPM : 1521010035

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/ 2020 M

ABSTRAK

Salah satu prinsip perkawinan ialah harus adanya rasa suka sama suka atau dengan kata lain tidak ada rasa keterpaksaan. Namun perkawinan yang terjadi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, yang mana pernikahan itu dilatarbelakangi oleh adanya rasa tanggung jawab akibat telah merusak fisik orang lain karena peristiwa kecelakaan lalu lintas. Permasalahan dalam penelitian ini ialah pertama, bagaimana latar belakang dan alasan pernikahan karena tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat? Kedua, bagaimana persepektif hukum Islam dalam hal pernikahan karena tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas tersebut?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer melalui wawancara dengan masyarakat Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat serta melalui dokumentasi yang kemudian dilengkapi dengan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengolahan data melalui pemeriksaan data, penandaan data, rekontruksi data, dan sistematisasi data serta dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan, *pertama*, Alasan dan latar belakang terjadinya pernikahan karena unsur pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu-lintas karena ingin menghindari diri dari sesuatu yang tidak diinginkan, bagi pelaku untuk menghindari diri dari jeratan hukum karena tidak mampu membiayai pengobatan korban, sedangkan bagi pihak korban khawatir tidak mendapatkan pasangan hidup karena kondisi cacatnya. Pernikahan tersebut tidak menjadi masalah, asalkan telah memenuhi syarat sah pernikahan. *Kedua*, dalam Islam memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai nikah karena tuntutan atas dasar tanggung jawab telah merusak fisik orang lain hingga cacat. Akan tetapi dengan melihat suatu kemashlahatan antara kedua belah pihak, selagi pernikahan itu membawa kemashlahatan antara keduanya, tidak menjadi masalah serta pernikahan itu tetap sah, asalkan memenuhi rukun dan syarat perkawinan.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saputra Ridho Abadi
NPM : 1521010035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KARENA TUNTUTAN PERTANGGUNGJAWABAN AKIBAT KELALAIAN BERLALU LINTAS (Studi Kasus Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)** adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Bandar Lampung, 21 Mei 2020

Yang Menyatakan,



Saputra Ridho Abadi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Saputra Ridho Abadi
NPM : 1521010035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Karena Tuntutan Pertanggungjawaban Akibat Kelalaian Berlalu Lintas (Studi Kasus Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Dr. Hj. Zuhraeni S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II,

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Rohmat, S.H., M.H.I.

NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Dipaksakan Karena Tuntutan Pertanggung Akibat Kelalaian Berlalu Lintas** (Studi Kasus Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat), disusun oleh Saputra Ridho Abadi, NPM. 1521010035, Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Oktober 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

Sekretaris : **Hasanuddin Muhammad, M.H.**

Penguji I : **Dr. H. Jayusman, M.Ag**

Penguji II : **Dr. Hj. Zuhraeni, M.H.**

Penguji III : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

Dekan,

Fakultas Syari'ah



Hasanuddin, M.H.
210221993031002

MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahnya)*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 201

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah swt, Tuhan Yang Maha Penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak dan Ibu (Erjon Hasan dan Siti Lestari) yang dengan tulus dan ikhlas merawat, mendidik dan selalu memberi kasih sayang serta memotivasiku dalam menggapai cita-cita.
2. Kakak dan adikku Ayu Pravitasari dan Jihan Selviana ramadhan yang selalu memotivasi dan mendukung untuk kesuksesanku.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Saputra Ridho Abadi. Dilahirkan pada tanggal 10 September 1996 di Giham Balak, Putra pertama dari tiga bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Erjon Hasan dan Ibu Siti Lestari.

Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di SDN 1 Giham Sukamaju pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Al-Ikhlas tamat pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Lampung Barat tamat pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puja dan puji bagi Allah swt., shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah swt. yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Karena Tuntutan Pertanggungjawaban Akibat Kelalaian Berlalu Lintas (Studi Kasus Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat) dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khoiruddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;

3. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Jurusan dan Dr. Abdul Qadir Zaelani, S.H.I, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
6. Guru dan ustadz yang telah ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Agama dan umum kepada saya agar menjadi pribadi yang baik.
7. Ayah, Ibu, Kakak dan Adik, terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua;
8. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
9. Sahabat-sahabatku Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu ada dalam suka dan duka.
10. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2015, teman-teman PPS dan KKN dalam menuntut ilmu serta untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.
Jazakumullah.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman.

Bandar Lampung, 21 Mei 2020
Penulis,

Saputra Ridho Abadi
NPM. 1521010035



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikasi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum perkawinan	15
2. Hukum Perkawinan.....	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	31
4. Prinsip Perkawinan.....	38
B. Konsep Lalu Lintas.....	44
1. Pengertian Lalu Lintas.....	44
2. Dasar Hukum Lalu Lintas	46
3. Tata Tertib dalam Lalu Lintas.....	46
4. Ketentuan Hukum Berlalu Lintas.....	47
C. Tinjauan Pustaka.....	50
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.....	55
1. Sejarah Singkat Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.....	55
2. Letak Geografi Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.....	58
3. Data Monografi Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.....	58
B. Pernikahan Karena Tuntutan Pertanggungjawaban Akibat Kelalaian Berlalu-lintas di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung	

Barat.....	60
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Latar Belakang dan Alasan Pernikahan Karena Tuntutan Pertanggungjawaban Akibat Kelalaian Berlalu-lintas di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.....	67
B. Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Karena Tuntutan Pertanggungjawaban Akibat Kelalaian Berlalu- lintas.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah, guna memperjelas persepsi mengenai skripsi ini, maka diperlukan penjelasan makna atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalamnya. Dengan jelas judul skripsi ini ialah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Karena Tuntutan Pertanggungjawaban Akibat Kelalaian Berlalu Lintas (Studi Kasus Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)

Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan ialah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari)¹. Sedangkan hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-syari'ah al-Islamy*.² Hukum Islam ialah hukum yang berpijak *kitabullah* (al-Qur'an) dan *kitabulhadits* (as-Sunnah) sebagai sumber utama ijtihad dan pijakan kedua sebagai pelengkap atau penyempurna sumber utama.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I Cet. Ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

³ Annawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2008), h. 7.

2. Pernikahan Karena Tuntutan Pertanggungjawaban Akibat Kelalaian Berlalu Lintas

Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Jadi pernikahan ialah hal (perbuatan) bernikah.⁴ Sedangkan menurut Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta saling tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁵

Tuntutan berarti hasil menuntut atau sesuatu yang dituntut.⁶ Pertanggungjawaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata tanggung jawab yang artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Jadi, pertanggungjawaban ialah perbuatan (hal dsb) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggung jawabkan.⁷ Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akibat berarti sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan).⁸

Kata kelalaian berasal dari kata lalai yang berarti kurang hati-hati.

Sedangkan kelalaian ialah sifat (keadaan, perbuatan) lalai.⁹ Berlalu lintas

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.962.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), h.23.

⁶ *Ibid*, h.1507.

⁷ *Ibid*, h.1389.

⁸ *Ibid*, h. 27.

⁹ *Ibid*, h. 776.

ialah hal yang berkenaan dengan lalu lintas (aturan yang perlu dipatuhi).¹⁰

Jadi yang dimaksud dengan akibat kelalaian berlalu lintas ialah suatu keadaan yang merupakan hasil akhir dari suatu peristiwa yang disebabkan oleh kurang kehati-hatian seorang pengendara dalam mengendarai kendaraan di perlintasan jalan.

Berdasarkan judul di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan judul keseluruhan yaitu suatu pernikahan yang terjadi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat karena adanya unsur tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas yang dilatar di pandang dari hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong peneliti untuk membahas masalah dalam proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

Persoalan ini merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji, mengingat adanya pernikahan yang dilatarbelakangi dengan adanya unsur keterpaksaan karena tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat .

2 Alasan Subyektif

a. Terdapat literatur yang mendukung untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut.

¹⁰*Ibid*, h. 777.

- b. Pokok bahasan proposal skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Syari'ah terutama jurusan Hukum Keluarga Islam.

C. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sakral yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasratnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.¹¹ Tak hanya manusia bahkan makhluk Allah swt yang lain pun seperti hewan dan tumbuhan melakukan perkawinan. Hanya saja dalam proses perkawinan manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi mengenai rukun dan syarat dalam pernikahan. Saling kerelaan antar kedua belah pihak juga menjadi acuan langgengnya suatu pernikahan.

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .¹²

Nikah didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzo* antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,¹³ dengan tujuan yang bersifat material yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

¹¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), h. 1.

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:Renika Cipta), h.23.

¹³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴ Sebagaimana yang termaktub firman Allah Swt QS. An-Nisaa' ayat 21:

...وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النِّسَاءُ : ٢١)

Artinya: "...Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat"¹⁵

Tujuan dari perkawinan adalah agar terjaga dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Taqiyyuddin Abi Bakar dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*, menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindari diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt.¹⁶

Makna nikah dari sisi sosiologis dalam teori pertukaran, melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban yang terjadi di antara sepasang suami isteri. Oleh karena perkawinan merupakan proses intergrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.¹⁷ Dengan demikian, dalam konteks sosiologi, bahwa perkawinan tidak akan terjadi bila tidak ada kesepakatan bersama, untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga terciptanya keluarga yang

¹⁴ Soedaryono Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 6.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 81.

¹⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 41. Lihat juga Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-ikhtishar*, (tnp.: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.t), h. 48.

¹⁷ T. O. Ihromi, *Bungan Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), h. 137.

sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam QS. ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera baik lahir maupun batin, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁹ Hal tersebut dibentuk berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami dan isteri.²⁰

Berbeda halnya dengan perkawinan yang terjadi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, yang mana pernikahan itu dilatarbelakangi oleh adanya rasa tanggung jawab akibat telah merusak fisik orang lain karena peristiwa kecelakaan lalu lintas. Peristiwa tersebut terjadi antara Eko (pelaku kelalaian lalu lintas) dan Isnaini (korban kelalaian lalu lintas). Bahwa pada tahun 2010 Eko yang sedang terburu-buru

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 406.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

²⁰ Dewani Romli., *Fikih Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2014), h. 12.

berangkat kerja yang berlokasi daerah Tulang Bawang, secara tidak sengaja telah menabrak pejalan kaki yaitu Isnaini yang hendak menyebrang jalan. Akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami cacat pada kakinya. Hal itulah yang menyebabkan seorang pria merasa bersalah dengan keadaan perempuan yang tidak sengaja ia celakai akibat peristiwa kecelakaan tersebut.²¹

Di sisi lain keluarga dari pihak perempuan menuntut agar pria tersebut, menikahi perempuan yang menjadi korban kecelakaan. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip sebuah perkawinan ialah harus adanya rasa suka sama suka. Akan tetapi, tindakan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apalagi hingga membuat orang lain celaka.

Hal inilah yang memotivasi penulis untuk membahas permasalahan dalam skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Karena Tuntutan Pertanggungjawaban Akibat Kelalaian Berlalu Lintas (Studi Kasus Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau, Lampung Barat).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kasus yang terjadi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau, Lampung Barat khususnya mengenai pernikahan yang dipaksa karena tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas. Dalam hal ini diambil 1 pasangan suami isteri yang menikah karena dipaksa yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

²¹ Eko, wawancara dengan penulis, kediaman Eko dan Isnaini di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Lampung Barat, 30 April 2020

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan alasan pernikahan karena tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana persepektif hukum Islam dalam hal pernikahan yang dipaksakan karena tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas tersebut?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui latar belakang dan bentuk pernikahan karena tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk menganalisa persepektif hukum Islam dalam hal pernikahan karena tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas tersebut.

G. Signifikasi Penelitian

Kegunaan penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian tentang pernikahan yang dipaksakan karena tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas.

2. Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan yang dipaksakan karena tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas.

H. Metode Penelitian

Penulisan proposal skripsi ini, peneliti menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat,²² yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²³ Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat, guna memperoleh data yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan karena tuntutan pertanggung jawaban akibat kelalaian berlalu lintas yang terjadi di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

²²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 28.

²³Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), h.2.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.²⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis penelitian kualitatif menurut Bagdam dan Taylor merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diminati.²⁵ Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti mengumpulkan data dengan meninjau pernikahan yang dipaksakan karena tuntutan pertanggung jawaban akibat kelalaian berlalu lintas dari hukum Islam studi kasus di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti yang harus ditelaah²⁶, yakni hasil wawancara dengan masyarakat Desa Giham Sukamaju

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h. 106.

²⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

²⁶ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), h. 106.

Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat yang menikah karena faktor kelalaian dalam berlalu lintas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjelaskan bahan hukum primer,²⁷ atau data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pernikahan, data yang diperoleh dari pihak lain bukan diusahakan sendiri pengumpulannya inilah yang disebut *secondary* data (data sekunder).²⁸ Seperti Al-Qur'an dan Hadis serta buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini yaitu buku yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia karya Zainuddin Ali, Fiqh Munakahat karya M. A. Tihami dan Sohari.

3. Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data di atas, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Pengumpulan data dari data primer, peneliti menggunakan metode:

1) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁹ Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara

²⁷ *Ibid*, h. 107.

²⁸ Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 67.

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 95.

yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data, penyusun melakukan wawancara dengan anggota masyarakat Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁰ Metode ini dilakukan untuk menghimpun data, pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian yaitu pada masyarakat Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dari data sekunder, peneliti menggunakan metode studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum deskriptif studi ini

³⁰ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 220.

dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.³¹ Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. penandaan data (*coding*) adalah pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan dalam ilmu hukum atau dokumen), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A, masalah yang kedua B), dan seterusnya.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h. 199.

hasil yang telah diperoleh.³² Metode analisa data dilakukan secara *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa masalah pernikahan yang dipaksa karena tuntutan pertanggung jawaban. Dalam analisis kualitatif, peneliti menggunakan berfikir *induktif*, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisa data peneliti akan mengolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

³² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan 2 (dua) kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).³³ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.³⁴

Nikah, secara etimologi, *al-jam'u* dan *adh-dhammu* yang artinya kumpul.³⁵ Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah, karena termasuk pengikatan sebab akibat.³⁶ Pengertian nikah menurut Imam Syafi'i ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan tubuh antara pria dan wanita.³⁷

³³ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015 (Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 808 (on-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>, (31 Mei 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.

³⁵ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5.

³⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 23. Lihat juga Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syarh Umdat al-Ahkam*, Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Pent: Kathur Suhardi, Cetakan ke-7, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), h. 739.

³⁷ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971), h. 65.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau yang berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* yang selanjutnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu perkawinan. Istilah nikah juga dipergunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.³⁸

Sedangkan arti kata perkawinan atau yang berasal dari kata kawin menurut bahasa Indonesia secara bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁹ Istilah kawin digunakan secara umum, untuk manusia, hewan, dan tumbuhan dan menunjukkan proses generatif secara lain. Berbeda dengan itu, istilah nikah diartikan sebagai akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki) dan hanya digunakan pada manusia, karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.⁴⁰

Menurut syar'i, nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ

“Suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan sebagai suami istri dengan menggunakan lafaz “inkah” (menikahkan), atau lafadz “tadzwij” (mengawinkan).”⁴¹

³⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.

³⁹ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.

⁴⁰ Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), h. 131.

⁴¹ *Ibid.*

Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti aqad, yaitu aqad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami isteri dan secara majazi berarti persetubuhan.⁴² Dengan kata lain nikah juga berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaja* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan definisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا
 “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”⁴³

Dari definisi di atas, baik menurut imam Syafi’i, para ahli fiqih, serta menurut syara’, mendefinisikan perkawinan ialah sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara suami dan isteri dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau yang semakna dengannya.

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁴⁴

⁴² Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 13.

⁴³ Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Jilid II, h. 48.

⁴⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 2.

Demikian juga sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Israh:

عَقْدٌ يُفِيدُ حِلَّ عَشْرَةِ بَيْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَوُّهُمَا وَيَجِدُ مَالَكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka.”⁴⁵

Pengertian ini memberikan arti bahwa dalam perkawinan terdapat kandungan untuk saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi rasa saling tolong-menolong.⁴⁶

Maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan dua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi satu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁴⁷

b. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan sunnaterrasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnaterrasul. Allah swt., berfirman Q.S. ar-Rum: 21:

⁴⁵ Abdur Rachman Gazhali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1

⁴⁶ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 15

⁴⁷ Beni Kurniawan, *Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga*, Edisi Pertama, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), h. 2.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁴⁸

Firman Allah swt., Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذّٰرِیّٰت: ٤٩)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."⁴⁹

Firman Allah swt.. Q.S. Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ (یس: ٣٦)

Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."⁵⁰

Allah swt., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulan

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 406.

⁴⁹ *Ibid*, h. 522.

⁵⁰ *Ibid*, h. 442.

saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya. Firman Allah swt. Q.S. an-Nisaa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."⁵¹

Firman Allah swt. Q.S. ar-Ra'du ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (الرعد: ٣٨)

Artinya: "Dan Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)."⁵²

⁵¹ Ibid, h. 77.

⁵² Ibid, h. 254.

Firman Allah swt.. Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sehayamu yang lelaki dan hamba-hamba sehayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁵³

Rasullah saw. bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْخِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه الجماعة)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah saw. bersabda “ Hai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu (menanggung) beban nikah, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan; Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”(H.R. Jama’ah)⁵⁴

Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِلِبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ
نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ أَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: Daripadanya r.a. (Anas bin Malik ra.)berkata Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin.”Beliau bersabda, “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih

⁵³ Ibid, h. 354.

⁵⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 385.

sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.⁵⁵

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَتَزَوَّجُ قَالَ بَعْضُهُمْ : أَصَلِّي وَلَا أَنَامُ , قَالَ بَعْضُهُمْ : أَصُومُ وَلَا أَفْطِرُ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ , قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفقى عليه)

Artinya: “Dan dari Anas, bahwa sesungguhnya ada sebagian dari sahabat Nabi saw. yang berkata: aku tidak akan kawin: Sebagian yang lain berkata: aku akan shalat terus menerus dan tidak akan tidur; dan sebagian yang lain lagi berkata: aku akan berpuasa selama-lamanya. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw. Maka ia bersabda: “Bagaimana gerakan kaum yang berkata demikian dan demikian? Padahal aku berpuasa, berbuka, shalat, dan tidak tidur juga mengawini perkawinan; Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, tidaklah ia dari golonganku”. (H.R. Bukhari dan Muslim)⁵⁶

Rasulullah saw. Bersabda:

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُورَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ , وَقَرَأَ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (رواه الترمذی)

Artinya: “Dan dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya nabi saw. melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat (Ar-Raad:38) “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (H.R. Imam Tirmizi)⁵⁷

⁵⁵ Ibid, h. 386.

⁵⁶ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009), h. 19.

⁵⁷ Ibid, h. 20.

Sabda Nabi saw. dengan “melarang membujang” dan sabdanya “maka kawinkanlah” dan beberapa hadits diatas oleh para fuqah dijadikan dasar wajibnya menikah.

2. Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatinya dan sebagainya.⁵⁸

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam al-Qur'an. firman Allah swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذَّارِيت: ٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. adz-Dzariyat: 49)⁵⁹

⁵⁸ H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 1

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 862.

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abduassalam, membagi mashlahat menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Mashlahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt., bagi hamba-Nya.

Mashlahat wajib bertingkat tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah), mashlahat yang paling utama adalah mashlahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemashlahatan yang paling besar. Kemashlahatan jenis ini wajib dikerjakan.

b. *Mashlahat* yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat mashlahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat mashlahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *mashlahat sunnah* akan sampai pada tingkat *mashlahat* yang ringan yang mendekati mashlahat *mubah*.

c. *Mashlahat mubah*. Bahwa dalam perkara *mubah* tidak terlepas dari kandungan nilai *mashlahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “Mashlahat *mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemashlahatannya dari sebagian yang lain. Mashlahat *mubah* itu tidak berpahala”.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Abu-Zahrah, *Ushul Fiqih*, terjemah Saefullh Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 558-559

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *mashlahat taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklif larangan, kemashlahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar keafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.⁶¹

Pada dasarnya para jumhur fuqaha berkomentar bahwa menikah itu hukumnya sunnah.

Golongan Syafi'iyah berkomentar:

الاصْلُ فِي النِّكَاحِ الْإِبَاحَةُ فَيُبَاحُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ وَالِاسْتِمْتَاعِ فَإِذَا نَوَى بِهِ الْعِفَّةَ أَوْ الْحَوِيلَ عَلَى وَلَدٍ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ

Artinya: “Nikah (kawin) hukumnya asalnya adalah mubah (boleh), maka seseorang oleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia bermaksud untuk menghindari diri dari berbuat haram, atau memperoleh keturunan, maka hukumnya sunnah.”

Pendapat ini banyak diikuti kebanyakan dinegeri ini.

Sedang golongan Zahiri menetapkan hukum wajib. Para ulama'

Maliki Mutaakhirin berpendapat bahwa menikah dapat dihukum wajib,

⁶¹ Ibid.

sunnah atau mubah, demikian ini dengan memperhatikan dampak pernikahan yang terjadi baginya.

Berdasarkan ijma', para ulama' sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahwa dengan menikah dapat mengurangi perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.⁶²

Perbedaan dalam menetapkan hukum nikah disebabkan permasalahan nikah yang terdapat dalam *fi'il amr* pada ayat atau hadis apakah diartikan wajib, sunnah atau mubah. Sebagaimana amr (kata perintah) termaktub dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 3:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ... (النساء: ٣)

Artinya: ...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat....⁶³

Ayat dan hadis di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah dapat berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Berikut secara rinci hukum nikah:

1) Wajib

Bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah.

⁶² *Ibid*, h. 21.

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Mubin (al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 250.

Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan nikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama' bahwa wajib hukumnya.

Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus kejurang perzinahan manakala ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup.

2). Sunnah (dianjurkan)

Menikah memiliki hukum sunnah bagi seseorang yang dapat mencari dan memberi nafkah akan tetapi belum berniat menikah dan/atau mampu mengendalikan nafsunya (tidak khawatir terjerumus perzinaan).⁶⁴ Hal ini dapat dianjurkan kepadanya untuk segera menikah, karena menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Hal ini merupakan pendapat Jumhur Ulama', kecuali Imam Syafi'i. alasan adanya hukum ini adalah menikah merupakan penyempurnaan setengah agama. Rasulullah saw.. bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 207.

Artinya: *“Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya).”*⁶⁵

Keutamaan hukum menikah diutarakan pula dalam hadis Rasulullah saw., diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abu Waqash ra., Rasulullah saw. bersabda bahwa ”

Allah swt., tidak menganjurkan hidup membujang bagi kita, namun menggantikannya dengan kesucian penuh toleransi (pernikahan),” hadits tersebut menjelaskan bahwasanya tidak ada anjuran bagi seorang yang mampu menahan syahwatnya untuk tidak menikah, dengan kata lain, sekalipun ia tidak khawatir terjerumus perzinahan, pernikahan tetap merupakan anjuran dan keutamaan dalam menyempurnakan ibadah. Hadits tersebut diperjelas dengan hadits Rasulullah saw. berikut:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِلِبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ أَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Artinya: *”Daripadanya r.a (Anas bin Malik r.a) berkata Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami untuk berumah tangga/kawin dan melarang kami membujang/tidak kawin.” Beliau bersabda, “Kawinlah dengan wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak dihari kiamat.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.*⁶⁶

⁶⁵ HR. ath-Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam ash-Shahihah Juz 2: 625

⁶⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 386.

Hadits ini menegaskan keutamaan nikah untuk mengembangkan generasi dan membedakan dengan kebiasaan pendeta Nasrani yang tidak menikah.⁶⁷

3). Makruh

Makruhnya menikah adalah bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga mampu untuk istrinya baik secara lahir maupun batin.⁶⁸ Oleh karena itu, hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. Allah Swt., berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. an-Nur ayat 33)

Pernikahan juga dihukumi makruh bagi seseorang yang dalam keadaan mampu baik secara harta, membiayai pernikahan, menafkahi istri, tidak dikhawatirkan terjerumus perzinaan apabila tidak menikah namun justru dikhawatirkan berbuat dholim baik berupa penganiayaan ataupun penelantaran terhadap istri jika terjadi pernikahan.⁶⁹

4). Haram

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yang akan melakukan pernikahan tersebut dipastikan tidak akan mampu memberikan nafkah

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Jilid 2* diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya Al-Faifi, (Solo: Aqwam, 2010), h. 207.

⁶⁸ *Ibid*, h. 208.

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amhaz, 2015), h. 46.

kepada istrinya baik secara lahir maupun batin.⁷⁰ Oleh karena itu, setiap orang yang hendak melakukan suatu pernikahan sedangkan ia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberi mahar dan menjalankan segala konsekuensi dalam pernikahan maka haram baginya untuk melakukan suatu pernikahan hingga dia benar-benar merasa mampu untuk melaksanakan segala konsekuensi dalam pernikahan. Pernikahan juga diharamkan jika tujuan dari adanya suatu pernikahan hanya untuk menyengsarakan seorang perempuan. Serta haram bagi seseorang yang mengidap penyakit yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami isteri sehingga tidak dapat terpenuhinya nafkah batin bagi salah satu atau kedua belah pihak. Sesungguhnya keharaman dalam suatu pernikahan disebabkan karena apabila pernikahan yang tetap dilaksanakan maka hal yang disyariatkan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai sebuah *kemashlahatan* (kebaikan) dunia dan akhirat tidak akan tercapai.⁷¹

5) Mubah

Hukum pernikahan adalah mubah apabila tidak ada hal-hal yang menjadikan keharusan dan/atau penghalang dilaksanakannya pernikahan pada diri seseorang.⁷² Dengan kata lain, hukumnya mubah jika seseorang tidak masuk dalam dua kategori pernikahan yang dihukumi sunnah dan haram. Oleh karena itu seseorang yang telah

⁷⁰ *Ibid*, h. 207

⁷¹ *Ibid.*, h. 45.

⁷² Sayyid Sabiq, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Jilid 2*, diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya Al-Faifi, (Solo: Aqwan, 2010), h. 209

mampu dan tidak takut melakukan maksiat, kemudian jika menikah juga tidak dikhawatirkan melakukan aniaya terhadap istrinya.⁷³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan menentukan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat,⁷⁴ atau adanya calon pengantin laki laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁷⁵

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khairudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁷⁶ Namun diakuiinya bahwa memang ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun

⁷³ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 83

⁷⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'awwaliah*, jus I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9; lihat Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45-46.

⁷⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.46.

⁷⁶ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), h.29.

perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya 2 orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁷⁷

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan;
- b. Mahar atau mas kawin;
- c. Calon pengantin laki-laki;
- d. Calon pengantin perempuan;
- e. *Sighat* akad nikah⁷⁸

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh Al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad); yaitu wali atau wakil dari calon suami);
- c. Dua orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah (ijab dan qabul)⁷⁹

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, (Birut: Daar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974), h. 219.

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul saja (akad yang dilakukan pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;
- c. Adanya saksi;
- d. Dilakukan dengan *sighat* tertentu.⁸⁰

Ibnu Qadamah dari mazhab Hambali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebut perkawinan sah bila ada wali dan ada saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qadamah, adalah sabda nabi yang mengatakan: “Tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”.⁸¹ Sedangkan Abdurrahman al-Jaziry berpendapat bahwa yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* di mana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.⁸²

⁷⁹ Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaih ‘Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin*, Cetakan kesatu (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M), h.382-400; lihat Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu’in bi Syarh Quratu Al-A’in*, (Cirebon: Al-Maktaba Al-Misria, t.t), h.99.

⁸⁰ Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), h.29

⁸¹ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Daar Al-Fiqr, 1404H/ 1984 M), h. 337-342.

⁸² Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mzahib al-Arba’ah*, Juz IV, (Dar al-Fikr, t.t), h. 12.

Menurut Ibnu Rasyid, bahwa membayar mahar menurut kesepakatan ulama-ulama hukumnya adalah wajib dan merupakan salah satu syarat sah pernikahan.⁸³ Hal ini juga diperkuat berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. an-Nisa' [4]: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ خُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء: ٤)

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.⁸⁴

Dan juga dalam firman Allah lainnya QS. an-Nisaa' [4]: 24 yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا
أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٢٤)

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah

⁸³ Ibnu Rasyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, Cet. 2, (Semarang: Usaha Keluarga, T.t.h.), h. 14.

⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 77.

*menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*⁸⁵

Hukum Islam menetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan calon suami tersebut. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:



 إِنَّ أَكْبَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَوْنَةً

Artinya: “Sesungguhnya Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya” (HR. Ahmad)

مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلَّةً كَفَيْهِ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ

Artinya: “Barangsiapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya” (HR. Muslim).

Mahar harus ada dalam setiap perkawinan akan tetapi tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan

⁸⁵ *Ibid.*, h. 77

syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syaf'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.⁸⁶ Berikut syarat-syarat dalam rukun nikah:

a. Syarat mempelai laki-laki, yakni:

- 1) Tidak ada hubungan mahram dari calon isteri
- 2) Kemauan sendiri (merdeka)
- 3) Jelas identitasnya
- 4) Tidak sedang menjalankan ikhram

b. Syarat mempelai perempuan, yakni:

- 1) Tidak ada halangan syar'i
- 2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah
- 3) Tidak ada hubungan mahram
- 4) Tidak dalam keadaan iddah
- 5) Kemauan sendiri (merdeka)
- 6) Jelas identitasnya
- 7) Tidak sedang menjalankan ikhram
- 8) Syarat-syarat wali

c. Syarat-syarat wali dalam perkawinan

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 61.

- 3) Aqil
 - 4) Baliqh.⁸⁷
- d. Syarat-syarat saksi
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Sehat akalanya
 - 4) Adil
 - 5) Mendengar dan melihat
 - 6) Tidak dipaksa
 - 7) Tidak sedang ibadah ikhram
 - 8) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
- e. Syarat ijab qabul
- 1) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus mumayyiz.
 - 2) Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
 - 3) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Misal, seorang wali apabila mengaqad nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
 - 4) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.⁸⁸

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh II*, Proyek Dan Pembinaan Sarana Dan Prasarana, (Jakarta: Pergutuan Tinggi, 1998), h. 60

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*: “Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah *fasid* dan nikah *batil* adalah sama, yaitu tidak sah.”⁸⁹

4. Prinsip Perkawinan

Asas-asas dan atau prinsip-prinsip perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

Ada beberapa ayat al-Quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, di antaranya:

... فَأَلَيْنَ بَشِيرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ... (البقرة : ١٨٧)

Artinya: “... Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”... (Q.S. al-Baqarah [2]: 187)⁹⁰

Prinsip perkawinan yang digambarkan dalam ayat di atas bahwa suami adalah pakaian isteri dan isteri adalah pakaian suami. Gambaran sebagai pakaian, mengingatkan bahwa fungsi suami dan isteri adalah untuk saling

⁸⁸ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utopi Jaya, Cetakan Pertama, 2009), h. 21-23

⁸⁹ Abd al-Rahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, h. 118.

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin, (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 29.

menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.⁹¹

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...

Artinya: "... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf" ... (Q.S. al-Baqarah [2]: 228)⁹²

... فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّمَّهِمَا وَتَشَاوُرٍ ... (البقرة : ٢٣٣)

Artinya: "... Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan..." (Q.S. al-Baqarah [2]: 233)⁹³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ... (النحل: ٩٠)

Artinya: "...Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil..." (Q.S. an-Nahl [16]: 90)⁹⁴

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٧)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Q.S. at-Thalaq [65]: 7)⁹⁵

⁹¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 348.

⁹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin, (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), h. 38.

⁹³ *Ibid*, h. 37.

⁹⁴ *Ibid*, h. 277.

⁹⁵ *Ibid*, h. 559.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S ar-Rum [30]: 21)⁹⁶

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khairuddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:

- 
- Prinsip musyawarah dan demokrasi;
 - Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
 - Prinsip menghindari kekerasan;
 - Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai partner;
 - Prinsip keadilan.⁹⁷

Selain 5 prinsip tersebut, masih ada prinsip lain, di antaranya:

- Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan khitbah (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
- Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;

⁹⁶ Ibid, h.406.

⁹⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA, 2005), h. 56

- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.⁹⁸

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut undang-undang perkawinan, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan umumnya, sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁹⁹
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama hal nya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.* h. 57

⁹⁹ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.a

¹⁰⁰ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.b

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.¹⁰¹
- d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita.¹⁰²
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka undang-undang ini menganut

¹⁰¹ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.c

¹⁰² Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.d

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.¹⁰³ Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan non Islam.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri¹⁰⁴

Jika dibandingkan prinsip-prinsip dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

¹⁰³ Penjelasan Umum UU No 1 Tahun 1974, butir 4.e

¹⁰⁴ Penjelasan Umum UU No.1 Tahun 1974, butir 4.f

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang;
- c. Asas monogamy terbuka;
- d. Asas calon suami istri telah siap jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga tidak berfikir kepada perceraian;
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian;
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat;
- g. Asas pencatatan perkawinan.¹⁰⁵

B. Konsep Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada

¹⁰⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2005), h. 59.

masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.¹⁰⁶

Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto lalu lintas adalah:

- a) Perjalanan bolak-balik
- b) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
- c) Perhubungan antara sebuah tempat¹⁰⁷

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Sedangkan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1

¹⁰⁷ J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 56.

¹⁰⁸ Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 butir 24.

2. Dasar Hukum Lalu Lintas

Peraturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b) PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan kemudian dicabut dengan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- c) PP Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Tata Tertib dalam Berlalu Lintas

Tata tertib berlalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain sebagai berikut:

- a) SIM
- b) Tidak Mengendarai Motor di Trotoar
- c) Menghormati Pesepeda dan Pejalan Kaki
- d) Larangan Menggunakan Ponsel Saat Berkendara
- e) Menggunakan Helm Saat Mengendarai Motor
- f) Menghidupkan Lampu Isyarat Saat Hendak Berbelok
- g) Memasang Nomor Polisi Pada Kendaraan

h) Menggunakan Sabuk Pengaman Saat Mengendarai Mobil

4. Ketentuan Hukum Berlalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), menjelaskan, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Berikut ketentuannya:

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun;
- (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.¹⁰⁹

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*Quasidelicht*) sehingga diadakan pengurangan pidana.¹¹⁰ Macam-macam unsur kelalaian yang menimbulkan kecelakaan:¹¹¹

¹⁰⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 360.

¹¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2010), h. 133

¹¹¹ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014), h. 83

a. Kelalaian karena orang, misalnya menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas. Untuk melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/ Kealpaan (*culpa*).

b. Kelalaian karena kendaraan, faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan seperti kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan.

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur lebih khusus tentang kelalaian/kealpaan dalam mengemudikan kendaraan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disebut UU LLAJ), di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka dan kematian

bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU LLAJ yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹¹²

¹¹² Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa: *“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”* Dengan demikian, peraturan yang berlaku bagi pelanggar lalu lintas ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Tjauan Pustaka

Masalah pernikahan paksa sudah dibahas oleh peneliti terdahulu dalam beberapa judul penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi pada tahun 2018 dengan judul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Saw.itto Kabupaten Pinrang)”* karya ilmiah Nelda K, bahwa pernikahan secara paksa terjadi di Kecamatan Watang Saw.ito Kabupaten Pinrang, informan yang melaksanakan pernikahan secara paksa status mereka ialah masih perawan dan dewasa. Pernikahan mereka terlaksana sah menurut agama (Islam) dan resmi menurut Negara. Faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga terjadi nikah paksa karena keinginan orang tua, faktor ekonomi, dan pacaran dengan laki-laki lain. Sedangkan dampak yang dihasilkan dari nikah paksa adalah berdampak pada keluarga, tidak adanya rasa cinta, dan berujung ingin pisah atau bahkan perceraian. Dari dampak terjadi pada pasangan tersebut dapat dipahami bahwa tergantung bagaimana pasangan tersebut menyikapi setelah menikah.¹¹³

¹¹³ Nelda K, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Paksa (Studi Kasus di Watang Saw.itto Kabupaten Pinrang)*, (Parepare: IAIN Parepare, 2018), tersedia di:

2. Skripsi pada tahun 2018, dengan judul “Tinjauan Masalah Terhadap Nikah Paksa (*Tumbuk*) Di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo”, karya ilmiah Dini Arifah Nihayati penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa nikah paksa (*tumbuk*) tergolong kedalam nikah sirri (tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Sedangkan pencatatan pernikahan merupakan produk Masalah *mursalah* yang tidak wajib digunakan akan tetapi boleh memakainya. Menikahkan pasangan zina termasuk kedalam Masalah *dlaruriyah*, karena melindungi salah satu dari 5 sektor kehidupan, yaitu melindungi keturunan. Dimana larangan zina dan larangan bagi lelaki baik-baik untuk menikahi wanita yang berzina dan wanita baik-baik dilarang menikahi laki-laki yang berzina di dalam Alqur'an erat kaitannya dengan menjaga kemurnian darah. Dimana kemurnian darah berpengaruh pada hak saling mewarisi.¹¹⁴

3. Skripsi pada tahun 2018, dengan judul “Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)”, karya ilmiah Shafika Noor Shahira. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implikasi kawin paksa terhadap keluarga di Desa Pandak adalah menimbulkan implikasi, seperti munculnya dampak sosial, tidak adanya rasa cinta dan keharmonisan dalam rumah tangga, kurang peduli terhadap keluarga, memicu adanya perselingkuhan pernikahan yang awal mula tidak ada rasa cinta membuat salah satu atau kedua belah pihak akan

<http://repository.stainparepare.ac.id/521/1/14.2100.037>, (akses internet pada tanggal 6 Maret 2020, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹¹⁴ Dini Arifah Nihayati, Tinjauan Masalah Terhadap Nikah Paksa (*Tumbuk*) Di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), tersedia di: <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/4106>, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

mencari cinta yang lain, bila menimbulkan konflik dan ujungnya perceraian, selain itu pelaku nikah paksa di masyarakat dikucilkan karena status mereka tentang nikah paksa yang dijodohkan oleh orang tuanya akan tetapi tidak berujung pada *sakinnah, mawaddah warrohmah*, melainkan perceraian, pelaku nikah paksa merasa tidak nyaman berada di lingkungannya sendiri.¹¹⁵

4. Skripsi pada tahun 2017, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Kenitu Pekon Serungkul Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)”, karya ilmiah Nazwin Pratama, bahwa dampak yang timbul akibat dari pernikahan dini karena paksaan orang tua berupa dampak negatif dan dampak positif. Namun, perkawinan yang terjadi di Dusun Kenitu, adalah perkawinan yang dipaksakan oleh orang tuanya dan berdampak baik bagi kehidupan mereka. Hukum pernikahan dini dalam Islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi. Pernikahan karena paksaan orang tua yang diantara kedua mempelai tidak ada rasa ridho diantaranya tidak diperbolehkan. Disisi lain, dampak yang terjadi jika pernikahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan kedua mempelai seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di dusun Kenitu

¹¹⁵Shafika Noor Shahira, *Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), tersedia di: <http://etheses.iainponorogo.ac.id/4096>, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

pekon Serungkuk Kabupaten Lampung Barat, maka Islam membolehkan hal tersebut.¹¹⁶

5. Skripsi pada tahun 2011, dengan judul “Nikah Paksa Menurut Perspektif Hukum Fikih”, karya ilmiah Ferry Pratama Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan mazhab dalam masalah fikih hukum nikah paksa. Perincian hukum nikah paksa dikategorikan dalam empat persoalan hukum, yakni nikah paksa terhadap gadis kecil, gadis dewasa, janda kecil dan janda yang sudah dewasa. Rincian hasilnya, bahwa Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum nikah paksa dari seorang bapak bagi gadis kecil dan janda yang belum dewasa adalah sah. Jika gadis dan janda tersebut sudah dewasa, pernikahan yang dipaksakan hukumnya adalah tidak sah. Sedangkan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum nikah paksa dari seorang bapak bagi gadis kecil dan dewasa adalah sah. Perihal janda kecil dan sudah dewasa, pernikahan yang dipaksakan pada mereka, hukumnya adalah tidak sah. Korelasi pendapat kedua madzhab tersebut dengan hukum positif di Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam, banyak perbedaan mendasar. Hukum positif di Indonesia lebih ditekankan pada kesiapan jasmani dan rohani wanita yang akan menikah. Dari perbedaan semua hal ini, baik kedua mazhab dan hukum positif, menunjukkan bahwa ijtihad

¹¹⁶ Nazwin Pratama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), tersedia di: <http://repository.radenintan.ac.id/2481>, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

dalam hukum, lebih ditekankan pada aspek penafsiran hukum dari dalil-dalil yang terperinci dan hasilnya melahirkan ijtihad yang berbeda-beda.¹¹⁷

Dari keenam judul penelitian di atas tidak terdapat kesamaan dalam membahas permasalahan pernikahan karena tuntutan pertanggungjawaban akibat kelalaian berlalu lintas. Oleh sebab itu penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Karena Tuntutan Pertanggungjawaban Akibat Kelalaian Berlalu Lintas (Studi Kasus Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat), perlu untuk diteliti lebih dalam oleh penulis karena sebelumnya belum pernah dibahas oleh peneliti manapun.



¹¹⁷ Ferry Pratawa Timur, *Nikah Paksa Menurut Perspektif Hukum Fikih*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, tersedia di: <http://etheses.uin-malang.ac.id/2530>, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2003)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ketiga, (Jakarta: Amzah, 2014)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amhaz, 2015)
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi'awwaliyah*, jus I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam Syarh Umdat al-Ahkam*, Edisi Indonesia: Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim Pent: Kathur Suhardi, Cetakan ke-7, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008)
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Wahab Khalaf, *Mashdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972)
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abi Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughni*, Cetakan 1, (Birut: Daar Al-Fiqr, 1404H/ 1984M)
- Abi Zakariya Yahya Al-Nawawi, Edisi Syaih 'Adil Ahmad Abd Al-Maujud, *Raudah At-Talibin*, Cetakan kesatu (Birut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1412H/ 1992M)
- Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 Desember 2015 (Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 2015), (on-line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/215/363>, (31 Mei 2020), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- Abu Ishak Asy-Syatibi, *Al-I'tisham Jilid II*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I Cet. Ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Ahmadi Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2008)

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)

Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014)

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008)

Beni Kurniawan, *Manajemen Pernikahan Tuntunan Praktis bagi Pasangan Muda, Nasihat Bijak untuk Semua Keluarga*, Edisi Pertama, (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012)

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)

Chaerul Umam, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Data Demografi Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009)

Eko, wawancara dengan penulis, kediaman Eko dan Isnaini di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Lampung Barat, 30 April 2020.

Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

H.S.A. Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996)

Ibnu Rasyid, *Bidayah Al-Mujtahid*, Cet. Kedua, (Semarang: Usaha Keluarga, T.t.h.)

Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddin, 1971)

Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017)

Isnaini, wawancara dengan penulis, kediaman Eko dan Isnaini di Desa Giham Sukamaju Kecamatan Sekincau Lampung Barat, 30 April 2020.

J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)*, (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013)

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA, 2005)

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)

Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-ihthashar*, (tnp.: Dar al-Kutub al-Islamiy, t.t)

Kompilasi Hukum Islam

Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan ke-10, Edisi 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002)
- Muhammad Abu-Zahrah, *Ushul Fiqih*, terjemah Saefullh Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy Al-Maliki, *Qowanin Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, (Birut: Daar Al-Ilmi Li Al-Maliyyin, 1974)
- Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-I*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017)
- Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-I*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017)
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- , *Mukhtasar Fiqh Sunnah Jilid 2* diterjemahkan oleh Sulaiman bin Yahya Al-Faifi, (Solo: Aqwam, 2010)
- Soedaryono Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta)
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003)
- Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- T. O. Ihromi, *Bungan Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 3, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011)

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maalibari, *Fathu Al-Mu'in bi Syarh Quratu Al-A'in*, (Cirebon: Al-Maktaba Al-Misria, t.t)

Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, Jilid II, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985)

